



Pendidikan Masa Pendudukan Jepang: Studi pada Pendidikan Militer Pasukan Pembela Tanah Air

Rahmat Adnan Lira,¹ Ridhwan², Fatimah³

¹Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

*rahmatadnan45@gmail.com

Dikirim: 05-08-2024; Direvisi: 10-12-2024; Diterima: 12-12-2024; Diterbitkan: 31-12-2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pendidikan pendidikan militer yang diterapkan oleh Jepang, meskipun dimaksudkan untuk mendukung upaya perang mereka, justru berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi faktor penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik sejarah, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan militer yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk mendukung upaya perang Jepang, namun kebijakan ini justru membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia untuk membangun kekuatan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) adalah salah satu kebijakan penting yang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia, yang akhirnya menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Praktik-praktik pendidikan Jepang yang keras berhasil membentuk karakter yang kuat dan semangat perlawanan di kalangan pemuda.

Kata Kunci: Pasukan Pembela Tanah Air; pendidikan; proklamasi

Abstract: This study aims to analyze the impact of the military education policy implemented by Japan. Although intended to support their war efforts, this policy successfully ignited a spirit of nationalism and became a crucial factor in Indonesia's struggle for independence. This research employs the historical research method. The data analysis process involves several steps: heuristics, historical criticism, interpretation, and historiography. The results indicate that the military education applied in Indonesia aimed to support Japan's war efforts. However, this policy inadvertently sparked a sense of nationalism among Indonesian youth, leading to a strengthened movement for Indonesian independence. The formation of the Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) was one significant policy that provided military training to Indonesian youth, who eventually became the backbone of the independence struggle. The strict educational practices of the Japanese successfully forged strong character and a spirit of resistance among the youth.

Keywords: education; Defenders of the Homeland Army; proclamation



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan identitas suatu bangsa (Awaliyah et al., 2022). Di Indonesia, masa pendudukan Jepang (1942-1945) memberikan dampak signifikan pada sektor pendidikan (Zuriatin, 2022), yang kemudian mempengaruhi budaya dan identitas masyarakat Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia

ditandai dengan kebijakan pendidikan yang diorientasikan untuk mendukung upaya perang Jepang dalam Perang Pasifik. Kebijakan ini mencakup disiplin militer yang ketat, indoktrinasi ideologi, dan pelatihan fisik bagi para pelajar. Pada masa ini, propaganda dan pendidikan militer menjadi alat untuk mencetak generasi muda yang loyal kepada Jepang. Meski demikian, kebijakan pendidikan yang dimaksudkan untuk mendukung kepentingan Jepang (Azmi et al., 2023), justru membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia.

Selama masa pendudukan, Jepang menguasai seluruh fasilitas pendidikan dan menggantikan kurikulum yang ada dengan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan perang Jepang (Hudaidah & Karwana, 2022). Propaganda dan pendidikan militer yang diterapkan bertujuan untuk mencetak generasi muda yang loyal kepada Jepang dan siap mendukung upaya perang mereka. Untuk menjalankan program tersebut, sistem pendidikan yang diterapkan Jepang di Indonesia adalah pendidikan untuk semua tanpa melihat derajat kebangsawanan (Fadli & Kumalasari, 2019).

Pendekatan pendidikan Jepang juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan kerja keras, yang tercermin dalam berbagai aktivitas fisik dan pelatihan militer di sekolah-sekolah. Praktik-praktik seperti senam pagi (*taiso*), penghormatan kepada Kaisar Jepang (*seikerei*), dan latihan-latihan militer merupakan bagian dari upaya Jepang untuk mengontrol dan membentuk karakter para pemuda Indonesia (Ramadhani, 2021). Namun, pendekatan yang keras dan otoriter ini sering kali menimbulkan resistensi dan kebencian di kalangan pelajar. Hukuman fisik yang diberlakukan oleh tentara Jepang, seperti pukulan di kepala, dianggap memperlakukan dan menyakitkan secara fisik. Meskipun demikian, pendidikan militer yang diberikan Jepang tidak sepenuhnya sia-sia. Banyak dari pemuda yang dilatih dalam program ini kemudian menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu kebijakan penting yang diperkenalkan oleh Jepang adalah persetujuan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Pembentukan PETA merupakan bagian dari upaya Jepang untuk mengorganisir pemuda Indonesia dalam mendukung upaya perang mereka (Hasanah & As'ad, 2023). Namun, keberadaan PETA kemudian menjadi salah satu faktor penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak pemuda yang dilatih dalam program ini kemudian menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan militer yang diterapkan oleh Jepang selama masa pendudukan di Indonesia (1942–1945) memengaruhi semangat nasionalisme dan perjuangan menuju kemerdekaan. Kebijakan pendidikan yang berfokus pada kedisiplinan, kerja keras, dan propaganda digunakan Jepang untuk mendukung kepentingan perang mereka. Namun, upaya ini justru menciptakan resistensi di kalangan pelajar dan pemuda Indonesia. Pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), meskipun awalnya dirancang untuk mendukung kebutuhan perang Jepang, menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pemuda Indonesia bangkit dan berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan (Munawaroh & Sustianingsih, 2022).

Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian menggunakan teori hegemoni budaya yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Menurut Gramsci, hegemoni merupakan cara suatu kekuasaan mempertahankan dominasinya tidak hanya melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui pengendalian ideologi dan budaya (Alfanani, 2019) yang salah satunya dilakukan melalui pendidikan. Dalam konteks ini, Jepang menggunakan pendidikan sebagai alat hegemoni untuk membentuk pola pikir pemuda Indonesia agar loyal terhadap Jepang. Kurikulum diubah sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan perang, dengan menanamkan nilai-nilai ideologi Jepang, memaksakan disiplin militer, serta menggantikan aktivitas akademik dengan latihan fisik dan senam pagi seperti taisho. Aktivitas-aktivitas ini dirancang untuk menciptakan generasi muda yang tunduk dan patuh pada kepentingan Jepang.

Namun, sebagaimana teori Gramsci juga menekankan, hegemoni tidak selalu berhasil (Ali, 2017). Dalam kasus ini, pendidikan yang dimaksudkan untuk melanggengkan dominasi Jepang justru menimbulkan perlawanan. Pelajar dan pemuda tidak hanya menolak nilai-nilai yang dipaksakan, tetapi juga mulai menyadari pentingnya identitas nasional mereka. Resistensi terhadap hukuman fisik, seperti pukulan yang dipandang memalukan, menjadi simbol ketidaksukaan terhadap pendekatan otoriter Jepang. Pendidikan militer yang awalnya diarahkan untuk mendukung perang Jepang juga memberikan bekal keterampilan strategis, fisik, dan disiplin yang kemudian dimanfaatkan untuk perjuangan kemerdekaan.

Dengan demikian, teori hegemoni budaya memberikan kerangka analisis yang mendalam untuk memahami bagaimana pendidikan Jepang, meskipun dirancang untuk memperkuat kendali mereka, malah berbalik menjadi katalis bagi tumbuhnya semangat nasionalisme. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pendidikan berfungsi tidak hanya sebagai alat kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang resistensi yang mampu membentuk karakter dan identitas nasional suatu bangsa.

Penelitian tentang pendidikan masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) telah banyak dilakukan, hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Alinur (2021), Sudibyo (2020), dan Zuriatin (2022) serta penelitian-penelitian lainnya yang membahas tentang pendidikan masa pendudukan Jepang. Walaupun penelitian tentang pendidikan masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) dapat dikatakan melimpah, namun penelitian tentang pendidikan militer yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia serta pengaruhnya bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dikaji lebih dalam. Hal ini menjadi celah untuk menelusuri peristiwa sejarah dan dikembangkan lebih lanjut.

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menganalisis pendidikan militer yang diterapkan Jepang pada masa pendudukan di Indonesia, pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) dan pelatihan yang diberikan oleh tentara Jepang terhadap masyarakat-masyarakat pribumi yang tergabung dalam PETA. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang peran krusial PETA dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana pendidikan militer yang diterapkan oleh Jepang, meskipun dimaksudkan untuk mendukung upaya perang mereka, justru berhasil membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi faktor penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi pendidikan selama masa pendudukan Jepang terhadap pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis kebijakan pendidikan Jepang selama masa pendudukan di Indonesia (1942–1945). Metode sejarah dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam peristiwa masa lalu berdasarkan bukti-bukti autentik dan analisis kritis. Proses penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu; 1) heuristik, tahap ini melibatkan identifikasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber mencakup data-data yang terkait dengan pendudukan Jepang seperti arsip, jurnal, buku-buku. 2) kritik sumber, data yang telah dikumpulkan kemudian dievaluasi melalui kritik eksternal dan internal untuk memastikan keasliannya. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai aspek fisik sumber, seperti keaslian dokumen atau arsip, sedangkan kritik internal dilakukan untuk memverifikasi keakuratan isi dan konsistensi data dengan fakta sejarah lainnya. 3) interpretasi, tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap isi sumber untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antara kebijakan pendidikan Jepang dan dampaknya pada budaya serta identitas masyarakat Indonesia. Peneliti menyoroti bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat politik Jepang untuk melanggengkan kekuasaan mereka dan bagaimana kebijakan tersebut memunculkan resistensi serta semangat nasionalisme. 4) historiografi, hasil analisis kemudian disusun menjadi narasi sejarah yang sistematis dan komprehensif. Peneliti mengintegrasikan temuan-temuan tersebut untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak pendidikan Jepang terhadap masyarakat Indonesia, dengan menempatkannya dalam konteks sejarah politik masa pendudukan Jepang.

Penelitian ini menggunakan perspektif sejarah politik untuk memahami kebijakan pendidikan Jepang dalam konteks kontrol politik dan dinamika kekuasaan selama masa pendudukan. Pendidikan pada masa itu tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan ilmu pengetahuan, melainkan digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan dominasi Jepang. Perspektif sejarah politik ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perang, tetapi juga untuk menanamkan ideologi Jepang dan mengontrol masyarakat Indonesia. Namun, dari perspektif yang sama, penelitian ini juga menyoroti bagaimana resistensi terhadap kebijakan tersebut muncul sebagai respons dari masyarakat. Pendidikan yang awalnya dimaksudkan untuk menguatkan posisi politik Jepang justru menjadi salah satu faktor penting dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme. Dengan demikian, perspektif sejarah politik memberikan landasan konseptual yang kuat untuk mengeksplorasi hubungan antara pendidikan, kekuasaan, dan perubahan sosial selama masa pendudukan Jepang.

Hasil dan Pembahasan

Periode Awal 1942

a. Masuknya Jepang di Indonesia

Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 menggantikan posisi Belanda yang saat itu berkuasa, menjajah dan mengeruk kekayaan Indonesia (Rizal, 2014). Awal mula masuknya Jepang ke Indonesia tentu mendapat perlawanan dari tentara Belanda yang saat itu menjajah Indonesia, namun kekuatan Jepang terlampaui lebih kuat sehingga usaha mereka untuk menghalau Jepang tidak berhasil (Sudibyo & Sidik, 2021). Batavia yang pada saat itu sebagai pusat komando kolonial Belanda berpindahtangan kepada Jepang pada tahun 1942, tepatnya tanggal 5 maret. Karena pusat komando telah dikuasai, wilayah-wilayah kekuasaan Belanda yang lain dikuasai dengan mudah oleh Jepang, karena perlawanan di daerah-daerah tersebut terbilang tidak berarti. Setelah tiga hari kota Batavia dikuasai oleh Jepang, pasukan Belanda dan sekutu menyerah kepada Jepang yang ditandatangani langsung oleh masing-masing perwakilan negara yaitu, Jenderal Ter Poorten yang mewakili Belanda dan Jenderal Imamura yang mewakili Jepang (Sudibyo & Sidik, 2021).

Jepang masuk ke Indonesia dilatarbelakangi oleh jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya yang cukup subur, potensi-potensi tersebut yang dianggap menguntungkan oleh pihak Jepang pada perang Asia Timur Raya. Tanah yang subur mampu memenuhi kebutuhan pangan, sedangkan penduduk dengan jumlah yang banyak mampu digunakan sebagai tenaga sukarela pertanian (Zufaidah, 2023).

Jepang dinyatakan menang dalam penyerbuan-penyerbuan yang mereka lakukan. Keberhasilan tersebut memberikan citra kepada negara-negara besar lain bahwa Jepang memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Terbukti dari kemenangan Jepang pada Perang Pasifik, hal ini menunjukkan bahwa Jepang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan yang luas (AM & Lestariningsih, 2017).

Setelah berhasil menduduki Indonesia, mula-mula Jepang melaksanakan misi imperialisme mereka dengan menanamkan doktrin Hakko I Chiu kepada masyarakat pribumi, yaitu doktrin yang dikenal Persemakmuran bersama Asia Timur Raya atau PAN Asia. Doktrin tersebut berisi peningkatan kerjasama antara negara yang berada di wilayah-wilayah Asia dan menjadikan Jepang sebagai pemimpin atas perdagangan dan kebudayaan. Dengan doktrin Hakko I Chiu, Jepang juga bermaksud untuk menghilangkan budaya dan campur tangan negara-negara Barat di Asia Pasifik seperti di Indonesia, Jepang berusaha menghapus pengaruh budaya-budaya Belanda yang pernah menjajah Indonesia (Isnaeni, 2008).

b. Perombakan Kebijakan Pendidikan dan Militerisasi Pendidikan

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, mereka membawa visi baru terhadap pendidikan. Jepang mengklaim diri sebagai “Saudara Tua” dan menjanjikan pembebasan dari kolonialisme Barat, meskipun pada kenyataannya Jepang memiliki tujuan untuk memperkuat kekuasaannya. Dalam konteks ini, pendidikan digunakan sebagai alat

propaganda untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia sekaligus membentuk tenaga kerja dan tentara yang loyal kepada Jepang.

Kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan lebih menitikberatkan pada doktrin militerisme, kedisiplinan, dan penanaman ideologi Asia Timur Raya. Selain mengganti bahasa pengantar dari Belanda menjadi Jepang dan Indonesia, mereka juga menghapuskan elemen-elemen pendidikan yang dianggap pro-Barat dan menggantinya dengan pelajaran yang memupuk semangat kebangsaan Asia.

Jepang berusaha menghapus pengaruh budaya-budaya Belanda dengan mengganti kurikulum lama yang diterapkan masa penjajahan Belanda dengan kurikulum baru yang sesuai dengan visi misi pendudukannya di Indonesia (Isnaeni, 2008). Semua elemen yang dianggap berbau Barat dihapuskan, termasuk penggunaan bahasa Belanda dan kurikulum yang tidak relevan dengan tujuan Jepang. Sebagai gantinya, pendidikan diorientasikan untuk mendukung kebutuhan perang dengan mengintegrasikan nilai-nilai militer ke dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Pendidikan pada masa itu menekankan disiplin keras sebagai fondasi utama. Siswa diwajibkan untuk mematuhi aturan dengan ketat dan mengikuti semua kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap aturan tidak hanya dianggap sebagai kesalahan, tetapi juga dihukum dengan metode yang sering mencerminkan praktik militer, seperti push-up, jalan jongkok, atau hukuman fisik lainnya. Disiplin yang diterapkan bertujuan menanamkan rasa tanggung jawab, ketaatan, dan kebiasaan hidup yang terstruktur, sehingga siswa terbiasa hidup dengan pola yang menyerupai kehidupan militer.

Selain disiplin, latihan fisik menjadi bagian penting dari sistem pendidikan. Setiap pagi, siswa diwajibkan melakukan senam pagi bersama, lari, push-up, baris-berbaris, dan berbagai latihan lainnya yang bertujuan memperkuat fisik mereka. Kegiatan fisik ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kebugaran, tetapi juga sebagai langkah awal untuk melatih mental siswa agar siap menghadapi tekanan. Pelatihan ini diintegrasikan dengan nilai-nilai militer yang ditanamkan secara terus-menerus. Siswa diajarkan untuk menghormati hierarki, mematuhi perintah atasan tanpa pertanyaan, memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan, dan mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu.

Sebagai bagian dari propaganda, Jepang juga memperkenalkan berbagai kegiatan simbolis yang dirancang untuk menanamkan loyalitas kepada pemerintah Jepang. Setiap pagi, siswa diwajibkan mengikuti upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang (*Kimigayo*), dan mengibarkan bendera Jepang. Upacara ini bukan sekadar ritual, tetapi alat untuk memperkuat ideologi "Asia Timur Raya," yang menggambarkan Jepang sebagai pemimpin bangsa-bangsa Asia dalam melawan penjajahan Barat. Dengan cara ini, Jepang berharap dapat menciptakan generasi muda Indonesia yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga loyal terhadap kepentingan dan ideologi Jepang.

Jepang juga memperkenalkan pelatihan semi-militer ke dalam sistem pendidikan formal (Pranoto, 2007). Pelatihan ini dirancang untuk mempersiapkan siswa menjadi tenaga cadangan yang dapat dimobilisasi untuk kebutuhan perang. Siswa diajarkan baris-berbaris,

strategi dasar militer, dan penggunaan senjata sederhana. Pelatihan semacam ini menjadi dasar bagi pembentukan organisasi seperti Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), yang bertujuan untuk melatih pemuda Indonesia menjadi bagian dari pertahanan Jepang di Asia Tenggara. Pelatihan semi-militer ini biasanya diawasi langsung oleh instruktur militer Jepang, yang menanamkan kedisiplinan tinggi serta loyalitas kepada Kaisar Jepang.

Latihan-latihan militer yang diajarkan Jepang dilaksanakan di sekolah-sekolah yaitu:

1. Mencari serta mengumpulkan material-material seperti batu dan pasir sebagai upaya mempersiapkan diri dalam perang Asia Timur Raya.
2. Peserta didik kadang mendapatkan tugas untuk membersihkan Asrama militer tantara Jepang dan bengkel (Ramayulis, 2012).
3. Pada beberapa waktu tertentu, peserta didik mendapatkan tugas untuk menanam sayur, ubi dan tumbuhan sejenisnya di pekarangan sekolah dengan tujuan agar memiliki persediaan makanan.
4. Peserta didik wajib untuk bersumpah dan mengucapkan kesetiaan pada kaisar Jepang setiap hari. Kemudian peserta didik mendapatkan pelatihan khusus yang berhubungan dengan kemiliteran.
5. Peserta didik kadang menanam pohon jarak agar tantara Jepang memiliki bahan pelumas (Rifa'i, 2011).

Keseriusan Jepang dalam melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang militer dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan siswa setiap hari. Siswa disibukkan dengan latihan fisik yang bertujuan untuk membentuk pemuda agar sukarela melawan sekutu bersama Jepang. Setiap sekolah pada masa itu memiliki barisan-barisan khusus siswa yang dibagi berdasarkan tingkatan dan jenjang pendidikan pendidikan, hal itu dilakukan Jepang demi mempermudah proses pemberian pendidikan militer kepada siswa di sekolah (Ahmadi, 1987).

Latihan-latihan militer yang dilaksanakan serupa dengan model latihan-latihan militer Jepang, karena kiblat latihan militer siswa di sekolah adalah tantara-tentara Jepang yang pada beberapa waktu menjadi pengajar langsung di sekolah (Supardan, 2008). Selain itu siswa-siswa di sekolah melakukan *taiso* (senam) di pagi hari sebagai bentuk mengikuti instruksi pendudukan Jepang, hormat kepada Kaisar Jepang (*seikerei*) dengan membungkukkan badan saat pagi mirip seperti gerakan ruku' ketika umat Muslim melaksanakan salat (Prabowo, 2019). Selain hormat kepada Tenno heika (kaisar Jepang) *seikerei* juga dilakukan saat bertemu dengan prajurit Jepang.

Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, propaganda mereka tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada generasi muda melalui sistem pendidikan. Jepang berhasil menanamkan sikap otoriter dan menguatkan sentimen anti-Barat di kalangan pelajar dan pemuda Indonesia melalui indoktrinasi politik dan pendidikan militer dasar. Aktivitas-aktivitas fisik dan latihan militer tersebut bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid agar siap membantu Jepang dalam perang. Barisan-barisan murid dibentuk di setiap sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Latihan militer dilakukan sesuai dengan model latihan militer Jepang, dengan tentara

Jepang yang kadang menjadi pengajar langsung di sekolah. Selain itu, murid-murid melakukan *taiso* (senam) di pagi hari dan menghormati Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan badan saat pagi. Hormat kepada kaisar Jepang ini juga dilakukan saat bertemu dengan prajurit Jepang sebagai bagian dari instruksi pendudukan Jepang.

Secara keseluruhan, militerisasi pendidikan pada masa pendudukan Jepang menunjukkan bagaimana sistem pendidikan dapat digunakan sebagai alat politik dan militer untuk mendukung kepentingan penjajah. Meski kebijakan ini awalnya bertujuan untuk menguntungkan Jepang, warisan dari sistem tersebut justru membantu bangsa Indonesia dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Dengan membentuk generasi muda yang tangguh, terlatih, dan disiplin, kebijakan ini menjadi salah satu contoh bagaimana pendidikan dapat berperan dalam membentuk sejarah suatu bangsa.

Periode Tengah 1943-1944

a. Pembentukan Peta

Pada tanggal 8 September 1943, Markas Besar Umum Satuan Darat Kawasan Selatan Jepang di Saigon mengeluarkan perintah untuk membentuk *Kyodo Boei Giyûgun* (Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air). Dua formasi pasukan pembela tersebut kemudian dibentuk di zona pendudukan Satuan Darat Jepang di Indonesia, satu di Sumatra di bawah Satuan Darat ke-25 sementara yang lainnya di Jawa di bawah komando Satuan Darat ke-16.

Pada waktu itu bangsa Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Jepang dan tidak pernah memaklumkan perang, karena Indonesia dalam keadaan terjajah. Yang memaklumkan perang adalah *Nederland Oost Indie*, bukan rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia tidak pernah diajak, berunding oleh Belanda mengenai situasi politik di Pasifik sedangkan Jepang meminta kontribusi Indonesia untuk membantu Jepang. Bangsa Indonesia mempunyai kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri menghadapi politik penjajahan dengan Jepang. Ini tidak dapat dikatakan suatu politik kolaborasi dengan musuh karena Jepang tidak berjuang dengan bangsa Indonesia (Rahardjo, 1993).

Pada mulanya, tantara pasukan yang dibentuk Jepang tidak disebut sebagai "Pembela Tanah Air", melainkan "Tentara Sukarela". Baru pada pertengahan tahun 1944 perubahan nama tersebut terjadi, setelah Oto Iskandardinata dan Jusuf Jahja membentuk sebuah badan untuk membantu keluarga para prajurit (Badan Pembantoe Keloearga Pradjoerit Pembela Tanah Air). Pada saat itu, Iskandardinata mulai memopulerkan nama PETA untuk menyebut Jawa pasukan tantara tersebut. Jepang sendiri kemudian mengizinkan para pemimpin nasionalis Indonesia menggunakan nama PETA, kemungkinan karena fakta bahwa Jawa lebih modern dibandingkan Sumatra. Selain itu, kebanyakan pemimpin pergerakan nasionalis Indonesia berada di Jawa.

Pada akhir tahun 1943 dan awal tahun 1944 dimulai dengan pembentukan *daidan* (batalyon) di seluruh Jawa, Madura, dan disusul kemudian di Bali. Pada prinsipnya setiap kabupaten (wilayah administratif) mempunyai satu *daidan*, sehingga suatu karesidenan yang terdiri dari beberapa kabupaten dapat mempunyai 2 sampai 5 *daidan*. Agar tidak

membahayakan posisi Jepang, para *daidan* tidak diorganisir dalam struktur hierarki, namun independen satu sama lain. Setiap *daidan* ditempatkan langsung di bawah perintah Komando Pertahanan Angkatan Darat Jepang setempat. Kontak antara masing-masing *daidan*, meskipun mereka mungkin tinggal di tempat tinggal yang sama, dicegah secara sistematis (Notosusanto, 1964). PETA pertama kali didirikan di daerah banten yaitu *daidan* I di bawah pimpinan *Daidan Tyo* K.H Syam'un dan yang kedua *Daidan* II di bawah pimpinan *Daidan Tyo* E.O Tranaya (Idris et al., 2022).

Pembentukan tentara PETA didasarkan atas usul Letnan Jenderal Kumakici yang diperkuat oleh Osamu Seirie No.44 pada tanggal 3 Oktober 1943 mengenai pembentukan pasukan sukarela untuk membela Jawa. Peraturan tersebut menetapkan dibentuknya tentara PETA secara resmi. Peraturan tersebut antara lain berisi:

1. Tentara PETA beranggotakan penduduk asli Indonesia.
2. Di dalam Tentara PETA akan ditempatkan militer Jepang untuk latihan.
3. Tentara PETA ditempatkan langsung di bawah Panglima Tentara, lepas dari badan manapun juga.
4. Tentara PETA merupakan tentara teritorial dengan kewajiban mempertahankan masing-masing daerahnya (*Syu*).
5. Tentara PETA di masing-masing daerahnya harus siap untuk melawan-mati setiap musuh yang menjerang pelantikan tentara PETA secara resmi dilakukan oleh Saiko Shikikan pada tanggal 8 Desember 1943 di lapangan Ikada Jakarta.

Sekalipun ada yang menuduh PETA sebagai alat Jepang, tapi realitanya PETA merupakan suatu persiapan pembangunan Tentara Nasional dalam Indonesia Merdeka (Rahardjo, 1993). PETA sejatinya memang disiapkan sebagai bibit-bibit tentara perjuangan oleh Soekarno. Salah satu tokoh yang merupakan hasil didikan PETA adalah Soedirman. Soedirman merupakan tokoh militer terkemuka pada masa revolusi, meski sebelum menjadi tentara PETA ia hanya menjadi seorang guru sekolah Muhammadiyah (Ricklefs, 2001). Pengorganisasian ini merupakan bentuk pengumpulan kembali prajurit-prajurit PETA yang telah dilucuti senjatanya. PETA yang dibentuk Jepang pada 3 Oktober 1943 merupakan satuan tentara yang beranggotakan orang Indonesia untuk tujuan mempertahankan setiap wilayah yang menjadi basis pertahanan Jepang di Indonesia dalam rangka memenangkan Perang Pasifik (Nugrahanto, 2018).

Gunseikan atau pemerintah (harian) militer Jepang memberikan suatu tanggapan dalam pembentukan PETA. Menurutnya, "Setiap lapisan penduduk di Jawa harus membantu sekuat tenaga pembentukan tentara untuk membela tanah air dengan keyakinan bahwa kemenangan atau kekalahan dalam perang ini akan menentukan bangkit atau hancurnya seluruh rakyat Asia (Nugrahanto, 2018).

b. Perekrutan dan Pelatihan/Pendidikan Militer dalam PETA

Syarat-syarat untuk menjadi prajurit PETA adalah pemuda Indonesia yang berusia 18-25 tahun, mempunyai badan yang sehat, berkelakuan baik dan pendidikan minimal SD/SR. Setelah lulus mengikuti beberapa tes, prajurit PETA menulis surat pernyataan kesediaan

untuk bertugas di medan perang. Selain syarat-syarat tersebut, seorang prajurit juga harus mempunyai sifat prajurit sesuai dengan amanat *Meiji Tenno*, yaitu:

Tiap-tiap prajurit hendaklah melaksanakan boedi bakti, dan itoelah poela jang haroes mendjadi toegas sedjati bagimoe sekalian

Tiap-tiap prajurit hendaklah menjelenggarakan kesopanan

Tiap-tiap prajurit hendaklah mendjoendjoeng keperwiraan

Tiap-tiap prajurit hendaklah mengindahkan boedi setia

Tiap-tiap prajurit hendaklah memelihara kesederhanaan (Pradjoerit, 1945).

Tsuciya Kiso, yang memimpin perekrutan khusus daerah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur memberikan kriteria-kriteria standar yang umum terhadap para pendaftar-pendaftar pasukan PETA karena pendaftar pasukan PETA terbilang cukup banyak. Jepang memberikan peraturan tentang kriteria-kriteria pemilihan tentara yang panitianya terdiri dari masyarakat Indonesia dan tentara Jepang seperti; 1) anggota tubuh sehat dan sempurna serta tidak terdapat cacat (pantat dan kelamin di periksa); 2) penglihatan berfungsi dengan baik; dan 3) mampu menjawab pertanyaan lisan dengan baik sesuai pertanyaan dan keinginan panitia seleksi.

Setelah melewati rangkaian proses seleksi yang cermat dan intens, para pemuda yang telah menempuh tahapan seleksi tersebut akan dikategorikan ke dalam dua golongan yang memainkan peran sentral dalam perjalanan mereka selanjutnya, yaitu golongan sebelah kanan dan golongan sebelah kiri. Golongan sebelah kanan melibatkan mereka yang berhasil melewati semua seleksi dengan prestasi yang memuaskan, dan karenanya, mereka diterima sebagai anggota aktif dalam tentara pelindung tanah air. Sebaliknya, golongan sebelah kiri mencakup individu yang tidak berhasil memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses penerimaan tentara pelindung tanah air.

Bagi para calon lulus yang beruntung dan terpilih, perjalanan mereka akan dilanjutkan dengan penempatan di asrama. Di sana, mereka akan menjalani pelatihan intensif yang dirancang untuk mengasah keterampilan dan kesiapan mereka sebagai anggota tentara. Proses ini tidak hanya memberikan pelatihan fisik dan mental, tetapi juga menciptakan ikatan solidaritas dan komitmen di antara sesama anggota. Bagi mereka yang tidak berhasil memenuhi kriteria, langkah berikutnya berbeda. Mereka akan diarahkan kembali ke tempat asal masing-masing di daerah setempat. Meskipun “kemerdekaan Indonesia” adalah topik yang terlarang ketika PETA dibentuk, kebanyakan orang Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera tiba, entah dalam bentuk apa pun. Ketika waktunya tiba, keberadaan sebuah tentara merupakan salah satu keharusan yang dimiliki negara baru.

Pendidikan bagi prajurit PETA dilakukan dengan sangat keras dan disiplin. Dalam satu hari prajurit hanya mempunyai waktu istirahat beberapa jam saja. Jadwal latihan bagi prajurit yaitu mulai dari bangun tidur, dilanjutkan dengan apel pagi, senam (*taiso*), MCK, makan pagi, latihan di lapangan dilanjutkan dengan apel sore, dan latihan dalam ruangan berupa teori, diakhiri dengan istirahat (tidur). Materi lain yang diberikan dalam latihan adalah tehnik menggunakan senjata, tehnik menyerang dan pengetahuan tentang jenis-jenis pesawat tepur.

Apabila prajurit PETA dalam masa pendidikannya melanggar peraturan maka mereka akan mendapat hukuman berupa tamparan, pukulan maupun disaseng (menjaga satu hari satu malam di markas). Hal yang sangat diperhatikan adalah kedisiplinan, sikap sopan santun serta taat terhadap aturan yang berlaku, hal ini dimaksudkan agar menjadi pengontrol diri dalam berperilaku. Pada malam hari, prajurit-prajurit diberikan waktu untuk belajar bahasa Jepang, diharapkan dengan keterampilan-keterampilan tersebut, prajurit-prajurit memiliki rasa juang yang tinggi untuk masyarakat (RI, 1997).

Waktu pendidikan militer PETA ditentukan oleh tingkat kepangkatan. Masa pendidikan militer bagi PETA yang paling lama adalah Sudanco yaitu 3-5 bulan, sedangkan pendidikan yang paling singkat adalah Daidanco yaitu 1-2 bulan. Oleh karena itu para Sudanco lebih banyak memiliki ketrampilan dan kemahiran dalam bidang militer dibandingkan dengan tingkat kepangkatan lain (Sagimun, 1985). Pelatihan militer tersebut diberikan Jepang dengan tujuan dapat melakukan penyerangan dan mempertahankan diri (Desiyana et al., 2013).

Tempat latihan bagi prajurit PETA dilatih di masing-masing daerah perekrutan PETA. Misalnya ketika perekrutan diadakan di Jakarta, maka pendidikan PETA juga akan diadakan di Jakarta Kochi. Tempat pendidikan yang sesuai dengan tempat perekrutan tersebut sesuai dengan tujuan pembentukan PETA, yaitu untuk mengawasi dan mengamankan daerah asal perekrutan. Dengan kata lain, hal demikian dilakukan karena prajurit PETA direkrut dari daerah sendiri dan akan ditugaskan di daerah sendiri. Pendidikan yang dilakukan di daerah sendiri membuat prajurit PETA kalah pamor dengan kesatuan Heiho bagi Jepang. Jepang beranggapan bahwa Heiho memiliki kekuatan serta kemahiran yang lebih baik daripada prajurit PETA.

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA) dibentuk sebagai bagian dari upaya Jepang untuk membentuk milisi lokal yang dapat bekerja sama dengan mereka. Latihan fisik perwira PETA melibatkan berbagai aspek untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi berbagai situasi dan tugas sebagai berikut.

1. Latihan Militer Dasar, Termasuk drill, formasi, dan taktik dasar. Ini mencakup pelatihan dalam pergerakan pasukan, pengepungan, dan taktik pertempuran konvensional.
2. Senjata dan Keterampilan Tempur, Perwira PETA dilatih dalam penggunaan senjata-senjata militer yang umumnya digunakan pada saat itu, seperti senapan, senjata ringan, dan senjata tajam. Mereka juga mempelajari taktik pertempuran yang dapat diterapkan dalam skenario tertentu.
3. Perang Gerilya, Mengingat situasi pendudukan, latihan perang gerilya menjadi penting. Perwira PETA dilatih untuk menggunakan medan dan kondisi setempat untuk menguntungkan mereka dalam taktik gerilya, termasuk keterampilan bertahan hidup di hutan dan penggunaan taktik penyergapan.
4. Kedisiplinan dan Kekuatan Mental, Faktor psikologis dan kedisiplinan juga menjadi fokus. Perwira PETA diajarkan untuk tetap tenang di bawah tekanan, menjaga kepatuhan terhadap perintah, dan memupuk semangat juang di antara anggota mereka.

5. Olahraga dan Kondisi Fisik, Latihan fisik umumnya melibatkan kegiatan olahraga militer seperti lari, dan latihan ketahanan fisik untuk membangun kekuatan dan daya tahan tubuh.

Ketika pasukan PETA menunjukkan tanda kelelahan dalam menjalani latihan yang diterapkan oleh pihak Jepang, para perwira dan instruktur dari pihak Jepang tidak hanya membatasi diri pada aspek fisik semata. Sebaliknya, mereka seringkali memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan pertanyaan filosofis yang mendalam kepada anggota pasukan. Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah "Indonesia *Dokuritsu Dekiruka?* (Mampukah Indonesia meraih kemerdekaan jika bahkan latihan sekeras ini saja sulit diatasi?)" (Oktorino, 2019). Melalui pertanyaan semacam ini, latihan tidak hanya dianggap sebagai proses pembentukan kebugaran tubuh, melainkan juga sebagai medium yang mendalam untuk membangun kekuatan mental dan semangat juang.

Dari penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa pembentukan, perekrutan dan pelatihan Tentara PETA (Pasukan Pelindung Tanah Air) yang dibentuk oleh Jepang selama masa pendudukan mereka di Indonesia. Pembentukan PETA dimulai pada tahun 1943 atas perintah Markas Besar Umum Satuan Darat Kawasan Selatan Jepang di Saigon. Meskipun awalnya tidak disebut sebagai pembela tanah air, namun kemudian nama PETA dipopulerkan dan diizinkan oleh Jepang. Proses perekrutan dilakukan dengan seleksi ketat, dengan kriteria fisik, mental, dan latar belakang pendidikan tertentu. Proses pelatihan dan pendidikan bagi anggota PETA dilakukan dengan keras dan disiplin. Mereka diberikan latihan militer dasar, keterampilan tempur, taktik gerilya, dan kekuatan mental. Latihan tersebut dirancang untuk mempersiapkan mereka menghadapi berbagai situasi dalam pertempuran dan membangun semangat juang. Para perwira PETA dilatih untuk memimpin dengan tegas dan menginspirasi anggota mereka. Selain itu, mereka juga diajarkan tentang pentingnya disiplin, kesopanan, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Periode Akhir 1945

a. Keuntungan Pembentukan Peta dan Prajurit Kemiliteran Lainnya

Jepang semasa menduduki Indonesia memberikan pendidikan dan pelatihan militer kepada pemuda-pemuda Indonesia, utamanya yang bergabung dengan tentara termasuk di antaranya Pembela Tanah Air (PETA). Selain itu, Jepang juga melatih siswa-siswa di sekolah dengan latihan ala militer, latihan tersebut seperti baris-berbaris, bahkan pada beberapa kesempatan, siswa diberikan perlengkapan senapan yang terbuat dari kayu dalam latihan baris-berbaris tersebut. Para pemuda yang mendapatkan latihan tersebut merasa bangga karena telah mendapat latihan militer, walaupun latihan tersebut digunakan Jepang sebagai cara untuk mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu (Pranoto, 2007).

Pemuda Indonesia beranggapan bahwa latihan militer yang diajarkan Jepang akan bermanfaat di masa yang akan datang. Pada masa Jepang, pemuda-pemuda dibuat seperti berada di atas angin, mereka merasa memiliki pengetahuan yang tidak mereka dapatkan di masa penjajahan Belanda karena pada era penjajahan sebelumnya, sangat sedikit pemuda yang mengetahui pengetahuan dasar kemiliteran. Pada masa sebelumnya pula sangat sedikit orang pribumi yang jadi komandan di kemiliteran, hal itu berbanding terbalik dengan masa

Jepang yang kebanyakan komandan berasal dari keturunan pribumi, khususnya pada pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Masa pendudukan Jepang membuat pemuda merasa bangga menjadi prajurit karena banyak tokoh-tokoh yang menyarankan pemuda-pemuda untuk membantu Jepang, selain itu, tokoh seperti Otto Iskandardinata yang merupakan pimpinan majalah Pradjoerit menyampaikan dalam pidatonya bahwa Sukarno pernah menyebut soal kejantanan pasukan Pembela Tanah Air amat berjibaku melawan musuh (Padmodiwirio, 1995).

Keuntungan nyata dari bentuk-bentuk organisasi yang muncul sebagai hasil dari mobilisasi dapat dilihat melalui pendidikan militer yang diterima oleh lebih dari dua juta pemuda Indonesia dalam bidang militer. Pasukan PETA (Pembela Tanah Air), sebagai organisasi besar dengan 69 batalyon dan jumlah anggota sebanyak 37.950 orang di Jawa serta 20.000 orang di Sumatera, menjadi tulang punggung dalam menciptakan kekuatan pertahanan yang signifikan di wilayah-wilayah tersebut. Ini tidak hanya meningkatkan potensi militer, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul.

Seinendan, yang mencatatkan 500.000 anggota. Di dalamnya, tokoh-tokoh nasionalis muda seperti Sukarni dan Latief Hendradiningrat mendapatkan pendidikan dan wadah untuk mengembangkan semangat nasionalisme. Selanjutnya, Keibodan menjadi organisasi besar dengan 1.000.000 orang anggota, menyediakan platform bagi pemuda untuk terlibat dalam kegiatan militer dan memperdalam pemahaman mereka terhadap pertahanan negara. Mobilisasi melalui organisasi ini memungkinkan partisipasi aktif dari banyak pemuda Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran nasional dan keterampilan militer.

Heiho, dengan jumlah anggota sebanyak 42.200 pemuda, juga turut berkontribusi dalam membentuk kader-kader yang siap berperan dalam pertahanan negara. Begitu pula dengan Suisyintai yang beranggotakan 80.000 orang dan Jibakutai dengan 60.000 anggota, baik di kota maupun di desa, memberikan landasan bagi pengembangan kapasitas pertahanan yang merata di berbagai lapisan masyarakat. Terakhir, organisasi seperti Hizbullah dan Fisabilillah yang mencakup sekitar 50.000 orang memberikan tambahan kekuatan dalam memobilisasi pemuda Indonesia untuk bersatu dan berperan aktif dalam pertahanan negara. Dengan demikian, melalui mobilisasi ini, terbentuklah basis yang kuat dari pemuda yang terlatih dan berkomitmen, yang kemudian menjadi keuntungan strategis dalam melindungi integritas dan kedaulatan Indonesia (Yasmis, 2007).

Jepang memberikan pemuda suatu pelajaran yang lebih berharga daripada pengajaran Belanda yang pernah diterima utamanya dalam bidang militer. Jepang mengajarkan kepada pemuda keterampilan yang sangat esensial, yaitu cara membangun sebuah tentara bagi rakyat Indonesia yang akan berguna untuk kepentingan Indonesia selanjutnya (Lebra, 1998). Pemuda yang memasuki barisan militer di masa pendudukan Jepang belajar mengenai organisasi dan disiplin yang ketat, fondasi utama dalam membangun kekuatan militer yang efektif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, pemuda mampu membentuk struktur tentara yang solid dan efisien. Selain itu, Jepang juga membimbing dalam teknologi militer terkini masa itu,

memperkenalkan inovasi yang membantu meningkatkan daya tahan dan efektivitas dalam pertempuran.

Pentingnya pelatihan dan pembinaan kemampuan individu juga menjadi fokus utama dalam pengajaran Jepang. Mereka memberikan perhatian khusus pada pengembangan potensi setiap anggota tentara, sehingga pemuda yang bergabung menjadi personel yang berkualitas tinggi. Selain itu Jepang memberi semangat patriotisme dan dedikasi yang kuat untuk melindungi negara. Sehingga, apa yang pemuda peroleh dari Jepang bukan hanya sekadar pembelajaran militer, melainkan fondasi yang kuat untuk membangun identitas pertahanan yang mandiri dan kuat.

Secara keseluruhan, pembentukan PETA dan organisasi keprajuritan lainnya di masa pendudukan Jepang memberikan dampak positif dalam mempersiapkan pemuda Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan, baik dari segi keterampilan militer maupun semangat nasionalisme. Meskipun latihan militer tersebut awalnya untuk mempertahankan kepentingan Jepang, namun fondasi yang dibangun pada masa itu menjadi landasan penting bagi pembentukan identitas pertahanan yang mandiri dan kuat bagi Indonesia.

b. Peran PETA dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Pada tanggal 1 Maret 1945, panglima Jepang di Jawa, Letnan Jenderal Harada Kumakichi, mengumumkan pendirian *Dokuritsu Zunbi Coosakai*, yang lebih dikenal dengan sebutan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (disingkat BPUPKI), kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, satu hari setelah Amerika menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima, Jepang membentuk sebuah badan baru di Jakarta yang dinamakan sebagai *Dokuritsu Zunbi Inkai* (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI). Dalam lembaga baru ini duduk dua orang perwakilan dari PETA, Daidancho Mr. Kasman Singodimedjo dari Daidan Jakarta dan Daidancho Abdoel Kadir dari Daidan Gombong.

Atas perintah Tokyo, Marsekal Terauchi menjanjikan kepada Sukarno dan dua perutusan PPKI lainnya yang berkunjung ke markas besarnya di Dalat, Vietnam, bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, golongan pemuda yang telah mendengar berita penyerahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 memutuskan untuk memaksakan proklamasi kemerdekaan Indonesia lebih awal. Tujuannya, mencegah kemungkinan adanya tuduhan bahwa Indonesia adalah sebuah negara ciptaan Jepang atau, lebih buruk lagi, Jepang tidak akan mengizinkan sebuah proklamasi kemerdekaan sesuai dengan persyaratan penyerahan yang dituntut oleh Sekutu agar mereka menjaga status quo hingga kedatangan pasukan Sekutu di Indonesia.

Pada tanggal 15 Agustus, untuk memuluskan rencana mereka, para pemuda, yang terutama terdiri atas mahasiswa kedokteran dari Ika Daigakku dan para pemuda yang bermarkas di Menteng 31, menggunakan kontak mereka dengan Daidan PETA di Jakarta, Shodancho Singgih. Sempat terkejut dengan berita penyerahan Jepang yang disampaikan oleh para pemuda, ia kemudian mengatur agar Sukarno dan Hatta dilarikan ke Rengasdengklok untuk mencegah diadakannya sidang PPKI yang akan dijadwalkan berlangsung pada tanggal

16 Agustus 1945. Rengasdengklok dipilih karena di tempat tersebut terdapat sebuah garnisun PETA dari Daidan Purwakarta yang pimpinannya dikenal baik oleh Singgih.

Dalam suasana panas setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu, para pemuda radikal dan unsur-unsur PETA di Jakarta di bawah Singgih berencana untuk menggerakkan anggota PETA, Heiho, Barisan Pelopor dan kelompok-kelompok laskar rakyat setempat untuk menyerbu tangsi-tangsi Jepang dan mengambil alih kekuasaan sebagai prakondisi guna mencetuskan sebuah revolusi. Namun, rencana itu dibatalkan oleh Chudancho Latief Hendradiningrat, yang menganggapnya sebagai suatu hal gegabah mengingat minimnya persenjataan yang dimiliki para pemberontak.

Sementara para pemuda dan anggota PETA yang menahan Sukarno dan Hatta di Rengasdengklok menanti-nanti berita meletusnya pemberontakan rakyat di Jakarta untuk memaksa kedua tokoh nasional tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Mr. Ahmad Soebardjo tiba di tempat itu. Ia menjelaskan kepada orang-orang yang ditemuinya di sana bahwa situasi Jakarta aman, tidak ada suatu pemberontakan maupun kerusuhan yang pecah. Hal tersebut sempat menimbulkan ketegangan antara para pemuda dan Sukarno-Hatta mengenai jadwal proklamasi kemerdekaan, di mana para pemuda bersikeras melakukannya pada hari itu juga di Rengasdengklok sementara dwitanggal ingin menunggu konfirmasi dari Jepang untuk menghindari suatu pertumpahan darah. Akan tetapi, akhirnya dicapai kompromi bahwa proklamasi kemerdekaan akan diadakan pada keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, asalkan Sukarno dan Hatta diizinkan untuk kembali ke Jakarta.

Sesampainya di Jakarta, sekalipun ada keberatan dari penguasa militer di Jawa, Sukarno dan Hatta berhasil mendapatkan dukungan Laksamana Maeda Tadashi untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tempat kediaman perwira Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang itu di Pengangsaan Timur No. 56. Latief berusaha mengamankan lokasi upacara proklamasi kemerdekaan dengan mengerahkan anggota garnisun PETA Jakarta, yang dilaporkannya sebagai sebuah latihan "pertahanan kota". Namun, upaya tersebut buyar karena sidokan batalion bersikeras untuk ikut serta. Untuk menghindari kecurigaan Jepang, akhirnya hanya sebuah regu PETA di bawah Latief sendiri yang ikut mengamankan lokasi upacara, sementara pengamanan selebihnya dipegang oleh Barisan Pelopor.

Pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan pada pukul 10.00, yang diikuti oleh upacara pengibaran bendera merah putih. Chudancho Latief sendiri mendapatkan kehormatan untuk menjadi petugas yang menaikkan bendera kebangsaan Indonesia tersebut. Dengan demikian, bangsa Indonesia akhirnya telah merdeka (Oktorino, 2019). Bebas dan merdekanya Indonesia yang dimulai di Rengasdengklok 16 Agustus 1945 merupakan hasil jerih payah perjuangan pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Perjuangan membebaskan Rengasdengklok dari kekuasaan Jepang ditandai dengan berkibarnya bendera merah putih. Dengan perjuangan yang terjadi di Rengasdengklok tersebut, pasukan Pembela Tanah Air (PETA) dianggap sebagai pewujud cita-cita Indonesia merdeka dan memiliki kedaulatan (Sarjito & Nurdiansyah, 2022).

Tidak hanya pada tanggal 16 Agustus 1945, 1 kompi pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang dipimpin oleh Chudancho Latief Hendraningrat mengawal pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Sukarno tanggal 17 Agustus 1945 di jalan Pengagasan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pengawalan itu dilakukan oleh pasukan Pembela Tanah Air (PETA) sebagai upaya untuk melindungi proses pembacaan proklamasi dari ancaman yang dikhawatirkan seperti serangan tiba-tiba dari tentara Jepang yang diperintah oleh Sekutu yang menjadi pemenang perang dunia.

Setelah pembacaan teks proklamasi, chudancho Latief Hendraningrat dari pasukan Pembela Tanah Air (PETA) mengibarkan bendera merah putih. Hanya saja, beberapa saat setelah berkibarnya bendera merah putih, beberapa pasukan Jepang dari Kenpetai (polisi militer Jepang) datang ke lokasi dan mengancam untuk segera menarik proklamasi yang telah terlaksana. Namun aksi yang dilakukan oleh sekelompok Kenpetai itu dihadang oleh anggota pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang berada disekeliling gedung, hal itu membuat nyali kelompok Kenpetai turun dan terpaksa meninggalkan gedung tersebut. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa pasukan Pembela Tanah Air (PETA) menjadi pengawal proklamasi kemerdekaan Indonesia dan berjasa atas merdekanya Indonesia (Gunadi et al., 2022).

Akibat pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia yang kala itu sudah merdeka berada dalam suasana siaga, sehingga pada 22 Agustus 1945 PPKI sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam sidang menetapkan untuk membuat tiga badan sebagai tempat untuk menyalurkan potensi rakyat. Ketiga badan yang dibentuk oleh PPKI di antaranya Badan Keamanan Rakyat (BKR), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Komite Nasional Indonesia (KNI).

Untuk para anggota pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang telah dibubarkan Jepang tanggal 18 Agustus 1945, presiden Indonesia kala itu menyerukan agar mantan pasukan Pembela Tanah Air (PETA) masuk ke Badan Keamanan Rakyat. Seruan tersebut diiringi dengan memberikan harapan bahwa suatu saat pasukan Pembela Tanah Air (PETA) akan dipanggil menjadi tentara Indonesia.

“Saya berharap kepada kamu sekalian, hai prajurit–prajurit bekas PETA, Heiho, dan Pelaut serta pemuda-pemuda lain, untuk sementara waktu, masuklah dan bekerjalah pada Badan Keamanan Rakyat. Percayalah nanti akan datang saatnya kamu dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan Indonesia”.

Berdasarkan seruan yang disampaikan oleh presiden, pemerintah daerah wilayah Indonesia yang baru saja merdeka mengadakan rapat dengan membahas langkah selanjutnya yang akan ditempuh dengan memperhatikan petunjuk yang disampaikan oleh tingkat atasnya. Petunjuk tersebut antara lain:

1. Badan Keamanan Rakyat (BKR) ditugaskan sebagai organisasi yang disebut BPKP atau Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang secara langsung diurus oleh Komite Nasional Indonesia (KNI).
2. BKR memiliki tugas untuk membantu menjaga kerukunan dan menghalau kemungkinan buruk yang terjadi dalam masyarakat.

3. Para bekas anggota KNIL, PETA, *Heiho* dan perkumpulan pemuda lainnya menyambut baik seruan yang disampaikan presiden, karena tersedianya wadah untuk melanjutkan perjuangan.

Pelaksanaannya melalui beberapa tahapan dan proses yang cukup rumit. Misalnya di tingkat Kabupaten bekas Opsir pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang memiliki pangkat tertingi, Bupati dan Kepala Polisi Negara melakukan musyawarah untuk menemukan jalan keluar dari berbagai masalah demi terlaksananya seruan presiden tersebut. Hasil dari musyawarah yang dilakukan mengeluarkan hasil:

1. Untuk para bekas prajurit KNIL, PETA, *Heiho* dan kelompok pemuda lainnya akan mendapatkan panggilan untuk berkumpul pada waktu dan tempat yang ditentukan.
2. Tugas pemanggilan akan dilakukan oleh Camat setempat kepada para Kepala Desa/Lurah melalui kurir yang membawa surat ke desa/kecamatan. Kurir khusus adalah pamong desa yang bergiliran untuk jaga piket di kantor kecamatan. Dengan cara ini, berita yang disampaikan akan cepat sampai meskipun daerah yang dituju berada dipelosok daerah.
3. Tentang biaya konsumsi para anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang berada di tingkat Kabupaten akan menjadi tanggung jawab Bupati yang juga sebagai ketua BPKKP Kabupaten, Wedana untuk tingkat Kawedanan dan Camat untuk tingkat Kecamatan.

Waktu itu komunikasi antar daerah provinsi sulit dilakukan sehingga yang mendengar seruan presiden hanya yang berasal dari pulau Jawa. Pulau-pulau di luar pulau Jawa seperti beberapa bagian dari pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya tidak mendapatkan informasi mengenai seruan presiden tersebut. Meski tidak mendapatkan informasi mengenai seruan yang disampaikan presiden karena sulitnya informasi, para pemuda Aceh membentuk sebuah angkatan pemuda Aceh yang disebut Angkatan Pemuda Indonesia (API), di Palembang pemuda-pemuda membentuk badan keamanan rakyat dengan nama Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Atas inisiatif-inisiatif dari para pemuda-pemuda tersebut mereka berusaha dengan sekuat tenaga menghalau ancaman yang berpotensi merusak kerukunan Negara Indonesia yang baru saja merdeka.

Peran PETA dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sangat signifikan, terutama dalam persiapan menuju momen tersebut. PETA, sebagai organisasi militer yang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia, memiliki perwakilan dalam badan persiapan kemerdekaan seperti BPUPKI dan PPKI. Kehadiran mereka dalam badan-badan ini menandakan pengakuan atas kontribusi dan representasi pemuda Indonesia dalam proses menuju kemerdekaan. Selain itu, PETA juga terlibat dalam upaya mencegah kemungkinan campur tangan Jepang atau Sekutu dalam penentuan nasib bangsa Indonesia, seperti upaya pemaksaan proklamasi kemerdekaan lebih awal untuk menghindari penundaan atau campur tangan eksternal yang merugikan.

Peran PETA tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga memiliki dampak dalam pembentukan organisasi-organisasi baru yang bertujuan untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Dengan adanya seruan dari Presiden Soekarno, bekas anggota PETA dan organisasi lainnya secara aktif terlibat dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR)

di tingkat daerah. Ini menunjukkan bahwa warisan perjuangan dan keterlibatan PETA dalam proses kemerdekaan terus berlanjut dalam upaya membangun dan menjaga stabilitas negara yang baru merdeka.

Kesimpulan

Pendidikan militer yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk mendukung upaya perang Jepang, namun kebijakan ini justru membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia. Disiplin keras dan pelatihan militer menanamkan nilai-nilai disiplin dan semangat juang, yang kemudian menjadi kekuatan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) adalah salah satu kebijakan penting yang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia, yang akhirnya menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Praktik-praktik pendidikan Jepang yang keras berhasil membentuk karakter yang kuat dan semangat perlawanan di kalangan pemuda. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Jepang selama masa pendudukan berperan penting dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia, serta dalam perjuangan kemerdekaan.

Daftar Rujukan

- Alinur, A. (2021). Impact of the Japanese Educational System on the Rise of Proclamation August 17, 1945. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(2), 27-33. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2287>.
- Ahmadi, A. (1987). *Pendidikan dari Masa ke Masa*. Armico.
- Alfanani, R. J. (2019). Hegemoni Budaya Dalam Novel Merpati Kembar di Lombok Karya Nuriadi: Kajian Hegemoni Antonio Gramsci. *Genta Bahtera: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan*, 5(1), 56–66. <https://doi.org/10.47269/gb.v5i1.81>.
- Ali, Z. Z. (2017). Pemikiran Hegemoni Antonio Gramsci (1891-1937) di Italia. *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 3(2), 63–81. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i2.5482>.
- AM., Sardiman., Lestariningsih, D. L. (2017). *Sejarah Indonesia*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Awaliyah, F., Aisiyah, A., Putra, F. E., & Santoso, G. (2022). Peradaban Patriotisme dan Nasionalisme; Generasi Muda sebagai Landasan Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 62–72. <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i3.306>.
- Azmi, M., Rama, B., & Razaq, A. R. (2023). Pendidikan Islam di Indonesia Pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang. *IQRA: Jurnal Magister Pendidikan Islam*, 3(01), 56–75. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqra/article/view/11452>.
- D., S. M. (1985). *Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang*. Inti Idayu Press.
- Desiyana, L., Syah, I., & Basri, M. (2013). Upaya pemerintah militer Jepang membentuk karakter militansi pejuang bangsa Indonesia tahun 1942-1945. *Jurnal Pendidikan Dan*

Penelitian Sejarah, 2.

- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 13(2), 189–205. <http://dx.doi.org/10.17977/um020v13i22019p189-205>.
- Gunadi, G. I., Septyanto, B. B., & Yudhotomo, U. S. (2022). Peran Penting Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) Dalam Perjuangan Meraih Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1362–1370.
- Hasanah, N., & As'ad, M. Y. T. (2023). Perkembangan Peradaban Islam Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang. *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 87–97. <https://doi.org/10.69698/jpai.v1i2.432>.
- Hudaidah, H., & Karwana, M. A. P. (2022). Pendidikan Di Indonesia Masa Pendudukan Jepang. *Danadyaksa Historica*, 1(2), 97–104. <https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4243>.
- Idris, A. M., Thamrin, S., Yoegiantoro, D., & Triprasetyo, R. A. (2022). Kontribusi Pembela Tanah Air (PETA) dalam Pembentukan TNI dengan Pendekatan Historis dan Ilmu Pertahanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 584–593. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1256>.
- Indonesia, K. P. R. (2015). Lintasan Sejarah Tanggal 5 Oktober Sebagai Hari Lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). *WIRA: Media Informasi Kementerian Pertahanan*, 56(40).
- Isnaeni, H.A., Afid. (2008). *Romusa Sejarah yang Terlupakan*. Ombak.
- Lailatul Munawaroh, Ira Miyarni Sustianingsih, S. (2022). Pengaruh Pendudukan Jepang terhadap Perkembangan Militer Sumatera Selatan Tahun 1942-1947. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 5(2), 222–241. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i2.4319>
- Lebra, J. C. (1998). *Tentara Gemblengan Jepang*. Pustaka Sinar Harapan.
- Notosusanto, N. (1964). Instansi yang melaksanakan pembentukan Tentara Peta. *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*, 2.
- Nugrahanto, W. (2018). BKR (BADAN KEAMANAN RAKYAT): Cikal Bakal Tentara Indonesia? *Metahumaniora*, 8(3), 389–398. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v8i3.20718>.
- Oktorino, N. (2019). *Keris dan Katana: Ikhtisar Sejarah Barisan PETA dan Giguyun pada Masa Pendudukan Jepang*. PT Elex Media Komputindo.
- Padmodiwirio, S. (1995). *Memoar Hario Kecik: Autobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit*. Yayasan Obor Indonesia.
- Prabowo, M. R. (2019). Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 di Kalimantan Barat: Suatu Pembunuhan Massal di Masa Penduduk Jepang. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 2(1), 26-37. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/868>.

Pradjoerit. (1945). *No. 7, 1 Januari*.

Pranoto, S. W. (2007). *Kaigun, Angkatan Laut Jepang, Penentu Krisis Proklamasi*. Penerbit Kanisius.

Rahardjo, P. (1993). *Tentara PETA (Pembela Tanah Air) Mengawal Proklamasi 17 Agustus 1945 Mulai dari Rengasdengklok*. PETA PRESS.

Ramadhani, S. (2021). Sejarah Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 8(1). <https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3410>

Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.

RI, D. P. dan K. (1997). *Sejarah Revolusi Fisik Daerah DKI Jakarta*. CV Eva Dharma.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since 1200. third Edition*. Palgrave.

Rifa'i, M. (2011). *Sejarah Pendidikan Nasional*. Ar-Ruzz Media.

Rizal, A. N. S. (2014). Pergerakan Islam Indonesia Masa Jepang (1942-1945). *Indo-Islamika*, 4(2), 179–189. <http://dx.doi.org/10.15408/idi.v4i2.17394>.

M. D., Sagimun (1985). *Perlawanan rakyat Indonesia terhadap fasisme Jepang*. Inti Idayu Press.

Sarjito, A., & Nurdiansyah, H. (2022). Nilai Dan Semangat Tentara Pembela Tanah Air (Peta) Untuk Membangun Budaya Strategis Bangsa Indonesia Dalam Memperkuat Bela Negara. *Universitas Pertahanan RI*, 12(1). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v12i1.1649>.

Sudibyo, S., & Humar Sidik, D. R. Y. (2021). *Seri Buku Infografis: Pendudukan Jepang di Indonesia*. GUEPEDIA.

Sudibyo, S. (2020). Peran Pendidikan di Masa Kependudukan Jepang (1942-1945) Terhadap Perubahan Budaya di Jawa Barat. *Jurnal Artefak*, 7(2), 75-80. <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v7i2.3269>.

Supardan, D. (2008). Menyingkap perkembangan pendidikan sejak masa kolonial hingga sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis. *Generasi Kampus*, 1(2), 96–106. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/view/6941>.

Yasmis, Y. (2007). Jepang dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), 24–32.

Zufaidah, M. Z. (2023). *Budidaya tanaman jarak pada masa pendudukan jepang di karesidenan bojonegoro tahun 1942-1945/Mila Zufaidah*. Universitas Negeri Malang.

Zuriatin, Z. (2022). Perkembangan Pendidikan dan Pengajaran Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. *Pendidikdas: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(01), 24–30. <https://doi.org/10.56842/pendikdas.v3i01.114>.